REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu program atau kebijakan dapat dilihat bagaimana program atau kebijakan itu diimplementasikan. Implementasi memiliki cakupan yang luas, karena implementasi tidak hanya mengukur suatu kebijakan bisa dikerjakan, namun juga dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Berikut definisi implementasi kebijakan menurut ahli yakni:

Menurut Wildavsky, implementasi memiliki definisi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana berupa peralatan agar mendapatkan sebuah hasil. Jika implementasi dalam konteks kebijakan, maka implementasi memiliki arti sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan kebijakan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan peralataan agar mendapatkan tujuan yang diinginkan.[1]

Jumroh dan Yoga mendiskripsikan implementasi sebagai sebuah konsep yang memiliki arti sangat luas terkait bagaimana suatu program atau kebijakan dieksekusi atau dilaksanakan dan apa manfaat serta hasil dari program yang telah dilaksanakan tersebut, dan faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut.[2]

Dari definisi yang telah disebutkan oleh beberapa ahli, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan bantuan perlatan, serta yang memiliki dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut.

Terdapat unsur penting untuk menjalankan sebuah implementasi kebijakan. Tachjan mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur yan harus ada diantaranya adalah bagian pelaksana, program yang dilaksanakan, serta kelompok sasaran kebijakan.[3]

---

[1] H Tachan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006).

[2] H Jumroh and Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik* (Solok, 2009), IV.

[3] Jumroh and Pratama, IV.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam perkembangan studi tentang implementasi kebijakan, terdapat beberapa pendekatan yaitu *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* adalah pendekatan yang erat kaitannya dengan standar pelaksanaan kebijakan, koodinasi serta birokrasi atau pelaksana. Sementara *buttom up* lebih ditekankan pada bagaimana menjalankan strategi untuk membuat tujuan yang ingin dicapai serta untuk menambah pemahaman terkait kebijakan publik secara menyeluruh.[4]

Sehingga dari perbandingan kedua pendekatan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan *top down* merupakan pendekatan dari atas ke bawah yang lebih ditekankan pada pelaksanaan *Standart Operating Procedure (SOP)* yakni bagaiaman sebuah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.[5] Sedangkan pada pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan dari bawah ke atas yang menekankan pada pembuatan strategi serta penentuan tujuan.

Selanjutnya pada konsep implementasi kebijakan, Ripley dan Franklin menyebutkan terdapat tiga dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program yakni kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi serta dampak yang dikehendaki.[6]

Tingkat keberhasilan sebuah program atau kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik diukur dengan menggunakan model implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan pembelajaran P2K2 pada penelitian ini. Alasan pemilihan model ini karena model Meter dan Horn menggunakan pendekatan *top down* untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap kinerja organisasi.

Model ini merupakan model yang diperkenalkan oleh Donal S Van Meter dan Carl E.Van Horn pada tahun 1975. Pada model ini, implementasi dipengaruhi oleh faktor manusia dan psikologis.[7]

---

[4] Tachan.

[5] Yulianto Kadji, 'Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas)' (Gorontalo: UNG Press, 2015).

[6] Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, 8th edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

[7] Kadji.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Meter dan Horn membagi ke dalam enam variabel untu mengukur kinerja implementasi, yaitu:

a. Sasaran dan Standar Kebijakan

Dalam pembuatan suatu kebijakan, standar yang ditentukan harus jelas dan dapat diukur agar program dapat direalisasikan. Apabila standar kebijakan yang dibuat tidak jelas makan tujuan program akan sulit untuk direalisasikan bahkan dapat menimbulkan konflik.[8]

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan elemen penting dalam implementasi suatu kebijakan, apabila pelaksana suatu kebijakan memiliki kualitas yang buruk makan program tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya yang diperlukan untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan dikategorikan ke dalam dua hal yakni sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.[9]

c. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas

Hubungan dan komunikasi antar organisasi sangat diperlukan dalam pelaksanakan suatu program, karena terkadang dalam satu program melibatkan banyak pihak eksternal. Oleh sebab itu, agar suatu program dapat bejalan dengan baik diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain.[10]

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakter berhubungan norma-norma, serta pola-pola hubungan dalam sebuah brirokrasi yang berpengaruh terhadap implementasi program yang dilaksanakan.

e. Kondisi Sosial, ekonomi, dan politik

Dalam menjalankan sebuah program akan dihadapkan oleh banyak hal diantaranya kondisi sosial, ekonomi dan politik. Tingkat keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi politik seperti adanya dukungan atau penolakan dari partisipan, opini publik terhadap program, serta dukungan elit politik.

f. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan komitmen serta watak dan perilaku yang harus ada pada implementor.[11] Disposisi

[8] Subarsono.
[9] Subarsono.
[10] Subarsono.
[11] Tachan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mencakup tiga hal yakni respon individu pelaksana sangat dipengaruhi oleh objektivitas dalam menilai suatu kebijakan. Kognisi atau tingkat pemahaman implementor terhadap program yang dikerjakan. Nilai yang dimiliki implementor, apabila nilai pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan makan implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.[12]

Gambar 1. 5 Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn

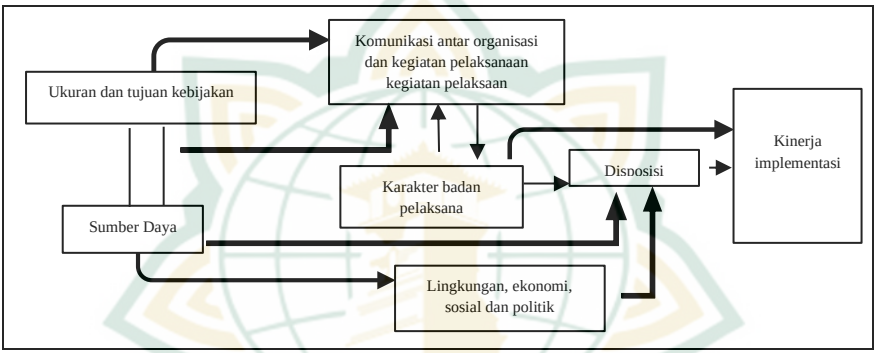

Sumber : Van Meter dan Horn (Buku Analisis implementasi kebijakan subarsosno, hal 100

2. Efektivitas

a. Teori Efektivitas Secara Umum

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasa dari kata efektif yang memiliki banyak makna yakni ada efeknya yang maksudnya adalah ada pengaruhnya, juga membawa hasil atau berguna. Dari makna tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keberhasilan dalam kegiatan yang menciptakan sebuah pengaruh.

Subagyo menjelaskan bahwa efektivitas terjadi karena output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.[13]

[12] Kadji.

[13] N W Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)* 2, no. 1 (2017): 49–57.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Najidah mendefinisikan Efektivitas sebagai sebuah keterampilan kerja dari seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran efektivitas sendiri dengan membandingkan antara rencana dengan realita yang terjadi. Karena berbicara mengenai efektivitas maka hal yang utama adalah ketepatan, apabila suatu hal yang pelaksanaannya tidak tepat, maka tujuannya pun tidak akan tercapai, sehingga menjadikan tidak efektifnya suatu kegiatan.[14]

Murah menjelaskan bahwa efektivitas memiliki keterkaitan terhadap terlaksananya sebuah tugas, tujuan yang tercapai, tepat waktu, serta keaktifan pelaksana tugas. Lebih lanjut, Murah memfokuskan efektivitas pada kualitas layanan dan kualitas output yang dihasilkan, yakni semakin baik kualitas layanan maka output dan pencapaian tujuan juga semakin baik. Kualitas output yang dimaksud adalah pada perubahan perilaku yang mana terdiri dari kognisi, psikomotor, serta afeksi.[15]

Sehingga dari pengertian efektivitas ditelaah dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan ketercapaian suatu tujuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada suatu program atau terealisasinya suatu rencana. Semakin banyak tujuan yang tercapai maka semakin efektif program tersebut dilaksanakan. Tujuan suatu program tidak hanya dilihat dari keberhasilan program, namun juga adanya perubahan pada perilaku setelah program dilaksanakan.

Penilaian efektivitas suatu program bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari suatu program dilaksanakan. Penilaian dilakukan karena efektivitas merupakan cerminan apakah program tersebut berhasil dan tepat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran pada penilaian terhadap suatu program dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mengevaluasi apakah program tersebut sudah efektif.

---

[14] Nurul Najidah, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1–17.

[15] Nurul Najidah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Efektivitas dalam Islam

Efektivitas erat kaitannya dengan keberhasilan mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan, maka dibutuhkan perencanaan yang tepat sebelumnya. Pandangan Islam menjelaskan bahwa segala sesuatu harus dikerjakan dengan rapi dan benar, serta proses yang harus diikuti dengan baik.[16]

Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَاعَمِلَ أَحَدُكُمُ الْعَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas. (HR Tabrani)

Oleh sebab itu, suatu kegiatan dikatakan efektif atau berhasil apabila dalam implementasinya dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam mengelola suatu organisasi maupun kegiatan harus dikelola dengan manajemen yang tepat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib yakni

الْحَقُّ بِلاَ نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

Artinya: Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik".

Penjelasan dari hal tersebut mengindikasikan bahwa hendaknya kaum muslimin dalam melakukan sesuatu yang hak (benar) agar sebelumnya telah ditata dan disusun dengan rapi, sehingga tidak dapat terkalahkan oleh kebatilan yang disusun dengan rapi.[17] Keberhasilan suatu kegiatan erat kaitannya dengan bagaimana implementasi kegiatan itu dilaksanakan. Sehingga, apabila suatu kegiatan yang dijalankan tidak sesuai tujuan yang diharapkan maka hal itu dikatakan sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104 yakni:

[16] Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

[17] Hafidhuddin and Tanjung.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۗ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah perlu kami beri tahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu?" (Yaitu) orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.

c. Indikator Efektivitas

Indikator dikatakan sebagai alat ukur yang berfungsi sebagai alat penunjuk untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada suatu kegiatan. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program menurut Sutrisno dalam Anis yakni:[18]

1) Pemahaman program,

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait program yang telah dilaksanakan. Pemahaman ini sangat diperlukan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pembuat program.

Selain itu, pemahaman program juga dilihat dari kapabilitas pelaksana kegiatan tersebut dalam menjelaskan kepada masyarakat agar aktif berpartisipasi.[19]

2) Tepat Sasaran,

Untuk melihat sejauh mana program ini tercapai, Indikator ini sangat penting untuk merumuskan bagaimana program tersebut apakah sesuai dan tepat pada sasaran seperti yang direncanakan sebelumnya. Sasaran disini maksudnya adalah mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan program

[18] Irawani Anis and others, 'Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa', *E-Journal UNIMUS*, 2, 3 (2021), 1105–16.

[19] Yulia Annisa, Tamrin Kamal, and Alkhendra Alkhendra, 'Family Development Session Sebagai Program Anti-Kemiskinan Di Desa Pungut Hilir? Kajian Atas Efektivitas Dan Kemandirian', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4.1 (2020), 103–24 <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-05>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pemberdayaan sesuai kriteria kelayakan dari program tersebut.

3) Tepat Waktu,

Ketepatan waktu sangat penting dalam penilaian efektivitas suatu program. Karena hal tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program. Hal ini terkait ketepatan waktu pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan sebelumnya. Selain itu, dari ketepatan waktu ini nantinya juga dapat diidentifikasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan apakah suatu program bisa berjalan dengan baik.

4) Tercapainya Tujuan,

Dalam merancang sebuah kegiatan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Karena tanpa adanya tujuan akan menjadikan kegiatan tersebut kehilangan arah yang ingin dicapai. Oleh sebab ini, kegiatan dikatakan berhasil karena tercapainya tujuan yang diinginkan. Indikator ini diukur melalui apa saja pencapaian tujuan program yang telah berhasil dilakukan.

Menurut Mahmudi dalam Agus (bahwa bahwa efektivitas mengarah pada outcome (hasil), sehingga suatu kegiatan yang dinilai efektif apabila outputnya sesuai target yang ingin dituju.[20]

Dilihat dari tujuan adanya pemberdayaan yakni apakah setelah adanya program akan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat.

5) Perubahan Nyata,

Keberhasilan suatu program itu tidak hanya dilihat dari apa saja pencapaian yang didapat. Namun juga, apakah program tersebut memberikan dampak nyata dalam lingkungan. Sehingga indikator ini diukur melalui seberapa jauh program berdampak pada perubahan nyata bagi masyarakat.

Dampak perubahan nyata yang terjadi di masyarakat nantinya dilihat dari perubahan perilakunya, misalkan yang sebelumnya tidak tahu pengelolaan keuangan, dan setelah adanya program

[20] Arlan Agus Sya'bani, 'Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin', *Jurnal Al'iidara Balad*, 2.1 (2019), 37–44.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pemberdayaan masyarakat mulai menabung atau dari hal konsumsi lebih mengedepankan kebutuhan daripada keinginan.

Penulis menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Sutrisna dengan mempertimbangkan beberapa alasan yakni pada setiap poinnya yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang terlibat dapat pelaksanaan program baik dari pelaksana yang disini adalah pendamping PKH, juga dengan penerimanya yaitu keluarga penerima manfaat PKH. Sehingga indikator tersebut sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, mengingat program ini yang memiliki tujuan jangka panjang untuk menumbuhkan kesadaran KPM serta adanya perubahan perilaku sumber daya KPM PKH.

3. Konsep Pemberdayaan

a. Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan berasal dari "daya" yang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna upaya atau kekuatan untuk bertindak. Sedangkan pemberdayaan sendiri merupakan adaptasi dari kata *"empowerment"* yang artinya wewenang yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sehingga jika dikembangkan lagi, maka pemberdayaan diartikan sebagai memberikan kekuatan kepada yang lebih lemah dengan tujuan untuk bisa hidup secara mandiri.[21]

Pemberdayaan menurut prosesnya memiliki dua kecenderungan yaitu primer dan sekunder. Kecenderungan primer diartikan sebagai proses pengalihan ataupun pemberian kekuatan maupun kemampuan kepada masyarakat dengan tujuan agar menjadi lebih berdaya, dan untuk menunjang proses ini perlu adanya dukungan pada aset material. Sedangkan kecenderungan sekunder menekankan pada pemberian stimulus berupa motivasi dalam proses pemberdayaannya, proses ini dilakukan dengan diskusi maupun berdialog untuk menentukan pilihan hidup. Meskipun kedua proses tersebut memiliki kecenderungan yang berbeda namun keduanya memiliki keterikatan dalam prosesnya yang pada beberapa kasus

[21] Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, De La Macca* (Makassar: De La Macca, 2018), I.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu untuk mencapai kecenderungan primer.[22]

Pemberdayaan sendiri memiliki definisi menurut Mardikanto dan Soebiato dalam Hamid mengartikan sebuah pemberdayaan sebagai sebuah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang lemah, disini juga dimaksudkan pada masyarakat miskin. Proses disini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan kemampuan untuk berkesempatan dalam akses sumber daya dan layanan. Sehingga pemberdayaan disini lebih merujuk pada proses yang sudah direncanakan sebagai upaya untuk mengupgrade kemampuan dari objek yang diberdayakan. [23] Hal ini sebagaimana konsep pemberdayaan yang dipaparkan oleh Meenai yakni pemberdayaan diartikan sebagai kolaborasi elemen proses perubahan kondisi masyarakat dan elemen pilihan masyarakat untuk membentuk pola perilaku baru.[24]

Hasan dan Aziz mendefinisikan pemberdayaan sebagai konsep yang mengaplikasikan nilai-nilai sosial dalam pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, pemberdayaan merupakan upaya peningkatan derajat lapisan masyarakat yang sebelumnya dikatakan sulit keluar dari kemiskinan. Sehingga dengan pemberdayaan bisa meningkatkan kemandirian masyarakat tersebut.[25]

Sementara Yenfi mengartikan Pemberdayaan sebagai proses pelatihan kepada masyarakat terutama kelompok rentan dengan tujuan untuk proses penyadaran, tranformasi, serta advokasi.[26] Pada proses pemberdayaan Yenfi menemui beberapa kendala yaitu kriteria latar belakang masyarakat yang berbeda menjadikan masyarakat hanya sekedar tahu,

---

[22] Muhammad Hasan and Aziz Muhammad, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Jakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2018).

[23] Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*....10

[24] Zubair Meenai, Empowering Rural Women: An Approach to Empowering Women Through Credit-Based Self-Help Groups (Aakar Books., 2003).

[25] Hasan and Muhammad, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. …139

[26] Yefni Yefni, 'Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat', *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 3.2 (2018), 42 <https://doi.org/10.24014/jmm.v3i2.6362>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sehingga setelah pelatihan masih tidak mampu menjawab permasalahan yang dialami sendiri, disamping itu keberagaman tersebut juga menjadikan masyarakat yang memiliki latar belakang petani akan bertambah pengetahuan dan keterampilannya, sementara untuk masyarakat dengan latar belakang lain tidak demikian. Selain itu, kendala juga ditemukan karena waktu pelatihan yang sering berbenturan dengan pekerjaan.[27]

Upaya-upaya dalam pemberdayaan sendiri memiliki tiga metode, yaitu pertama dengan menciptakan iklim agar masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki potensi tersendiri yang dapat dikembangkan. Dan pemberdayaan disini memiliki fungsi untuk memberikan dorongan berupa motivasi terhadap potensi yang dimiliki untuk dikembangkan.[28]

Kedua, setelah masyarakat mengetahui perihal potensi yang dimilikinya selanjutnya sisi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat potensi tersebut melalui langkah nyata seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kemudahan kemajuan ekonomi. Upaya pemberdayaan disini dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan, listrik, irigasi juga pada pembangunan sekolah serta peningkatan fasilitas kesehatan dengan harapan dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. Selain itu juga mengembangan dan penyediaan lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran terutama di lingkungan pedesaan. Pemberdayaan sendiri dalam penguatan kemampuan individu dibarengi dengan penanaman nilai-nilai modern seperti kerja keras, mengelola keuangan juga bertanggungjawab.[29]

Ketiga, memiliki upaya dalam melindungi yang lemah agar tidak menjadi lebih lemah. Perlindungan disini untuk mencegah eksploitasi terhadap yang lemah. Pemberdayaan seperti tujuan akhirnya yakni kemandirian masyarakat, sehingga adanya pemberdayaan dimaksudkan agar

---

[27] Yefni.

[28] Hasan and Muhammad, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. …139

[29] Hasan and Muhammad, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. …140

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

masyarakat tidak tergantung pada program bantuan, karena pada hakekatnya apa yang di dapat itu hasil dari kerja keras sendiri.[30]

Tujuan pemberdayaan yakni memiliki upaya perbaikan, di antaranya:[31]

1) Pendidikan

   Pendidikan dalam pemberdayaan tidak hanya menyoroti pada perbaikan materi ataupun metode pendidikan. Namun lebih penting dari itu adalah pada bagaimana dalam proses pemberdayaan mampu memotivasi untuk semangat terus dalam belajar.

2) Aksesibilitas

   Setelah berkembangnya semangat untuk terus belajar, sehingga pengetahuan pun juga meningkat, diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam akses teknologi, sumber pembiayaan, mencari produk serta kemudahan dalam memasarkannya.

3) Tindakan

   Dengan pengetahuan yang lebih serta kemudahan dalam akses segala bentuk informasi dapat mempengaruhi terhadap tindakan yang menjadi lebih baik

4) Kelembagaan

   Perbaikan kelembagaan harapannya dapat mempermudah dalam menjalin kemitraan terutama dalam bidang usaha.

5) Perbaikan Usaha

   Perbaikan usaha merupakan implikasi dari perbaikan-perbaikan sebelumnya. Peningkatan pengetahuan masyarakat, kemudahan akses informasi, serta kelancaran dalam menjalin kerjasama usaha dapat berdampak pada usaha maupun bisnis yang dapat dijalankan dengan lebih baik.

6) Pendapatan

   Dengan bisnis dan usaha yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik keluarga juga masyarakat

---

[30] Hasan and Muhammad, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. …140

[31] Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. …14

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

7) Lingkungan

Perbaikan lingkungan ini seringkali disebabkan oleh faktor kemiskinan dan pendapatan yang terbatas. Sehingga dengan pendapatan yang lebih baik, mampu berdampak pada lingkungan yang lebih baik dari segi fisik maupun sosial.

8) Kehidupan

Adanya lingkungan yang sehat mampu berdampak dalam memperbaiki kehidupan baik di keluarga dan masyarakat.

9) Masyarakat

Terwujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dipengaruhi oleh situasi kehidupan dan lingkungan baik fisik maupun sosial yang baik.

b. Konsep Pemberdayaan dalam Islam

Dalam pemberdayaan masyarakat, Adib mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan yang digunakan, yakni: *Pertama,* Pendekatan Parsial-Kontinu, dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara pemberian bantuan kebutuhan pokok juga sarana dan prasarana. Bantuan ini diberikan pada orang yang memiliki keterbatasan dalam bekerja sendiri seperti lansia, orang yang memiliki keterbatasan tertentu dan juga anak-anak. *Kedua,* Pendekatan structural berupa pemberian bantuan melalui pengambangan kemampuan atau *skill* dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian sehingga mampu secara mandiri mengatasi kelemahannya sendiri.[32]

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat aplikasikan ke dalam tiga strategi: *Pertama,* pemulihan kembali pada sisi psikologi. Perubahan yang terjadi berupa perubahan dari nilai positif yang diberikan mampu menimbulkan nilai aktif pada masyarakat. Alur pemulihan dimulai dari tahap *awareness*, berupa pemberian penjelasan dan pemahaman secara umum kepada masyarakat, selanjutnya tahap mulai menarik minat masyarakat terhadap program pemberdayaan, lalu tahap percobaan, dan terakhir tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, masyarakat mulai mempertimbangkan bahwa kemiskinan bukanlah sebuah

[32] Adib Susilo, 'Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam', *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2016) <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

takdir yang hanya bisa dijalani dengan kepasrahan namun harus dilakukan perubahan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. *Kedua* berupa tahap lanjutan. Pada tahap lanjutan, seseorang sudah mulai sadar untuk melakukan perubahan, sehingga pada tahap ini dilakukan dengan upaya peningkatan pada perubahan perilaku masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dengan keikutsertaan dalam pelatihan, pengembangan kemampuan manajerial juga pengembangan dalam teknologi. Dan *Ketiga*, setelah dipastikan bahwa peningkatan kemampuan telah bertambah, maka pada strategi kali ini dilakukan dengan memberikan suntikan modal untuk usaha yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. [33]

Adanya pendekatan dan strategi diharapkan agar masyarakat khususnya muslim mampu lebih berdaya dalam hal meningkatkan dimensi spiritual (Iman), menambah dimensi pengetahuan (*'ilm*), juga pada dimensi social (*amal*). Karena jika dengan terpenuhinya iman, ilmu dan amal mampu meningkatkan perubahan mindset masyarakat muslim sehingga lebih lanjut bisa tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*)[34]

Ditinjau dari perspektif islam, perubahan perilaku menjadi mandiri merupakan suatu bentuk kesejahteraan. Irfan Syauqi Beik dan Laily D.A menjelaskan arti kesejahteraan merupakan kondisi seseorang yang terlepas dari kemiskinan, rasa takut, serta kebodohan, sehingga muncul rasa aman baik secara lahir maupun batin.[35] Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja agar terlepas dari kemiskinan. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al hasyr ayat 7 yaitu:

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ

[33] Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." …206

[34] Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." …207

[35] Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*[36]*

Dalam Islam, manusia dituntut untuk mandiri dengan cara bekerja dan berusaha agar tidak bergantung dengan bantuan orang lain. Sebagaimana dalam hadist HR Muslim nomor 2073 yang artinya:[37]

"Sesungguhnya seseorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mera memberi atau tidak".

4. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

a. Konsep P2K2

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu upaya yang dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat adalah dengan adanya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk percepatan dalam membentuk perubahan perilaku pada KPM PKH.[38] Hal ini

[36] Kemenag, 'Quran Kemenag' (kemenag, 2023).

[37] Heru Ardiyanto, 'BEKERJA SEBAGAI MANIFES KEIMANAN', *Hrd.Uii.Ac.Id*, 2023 <https://hrd.uii.ac.id/bekerja-sebagai-manifes-keimanan/> [accessed 21 December 2023].

[38] Alif Mufida Ulya, 'Tinjau Pelaksanaan P2K2, Mensos Beri Edukasi Kepada KPM PKH', *Kemensos.Go.Id*, 2020 <https://kemensos.go.id/tinjau-

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sesuai dengan tujuan dari PKH yakni menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat, sehingga dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya melalui pemberian bantuan setiap bulan, namun juga pemberian edukasi terkait bagaimana pola pengasuhan anak yang baik, cara menjaga kesehatan keluarga baik lansia maupun disabilitas, serta bagaimana pengaturan keuangan keluarga hingga cara untuk memulai usaha.[39]

Jibril dkk menyebutkan bahwa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang lebih dikenal sebagai *Family Development Session* (FDS) adalah pendidikan non formal yang diberikan untuk keluarga. Pembelajarannya berupa pemberian informasi praktis terkait kesehatan, ekonomi, pemberdayaan, juga kesejahteraan keluarga, serta dalam perlindungan sosial dan berbagai informasi mengenai kebijakan di PKH. Bentuk kegiatannya dengan konsep kelompok belajar yang dibentuk oleh pendamping.[40] Untuk melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pendamping PKH. Sehingga sebelumnya telah dibekali melalui Diklat P2K2 oleh Balai diklat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaanya bisa berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan.

b. Tujuan

Setiap program yang dijalankan tentunya ada tujuan yang di ingin dicapai. Begitu juga Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang pada dasarnya bertujuan dalam upaya peningkatan pengetahuan KPM PKH dalam mengasuh dan mendidik anak, kesehatan, mengelola keuangan, juga pengetahuan terkait kesejahteraan sosial di

pelaksanaan-p2k2-mensos-beri-edukasi-kepada-kpm-pkh> [accessed 24 June 2022].

[39] Katriana, 'Bansos PKH Diharapkan Munculkan Perubahan Perilaku Penerimanya', *Antara News*, 2020 <https://www.antaranews.com/berita/1504892/bansos-pkh-diharapkan-munculkan-perubahan-perilaku-penerimanya> [accessed 25 June 2022].

[40] Maulana Jibril and others, 'SOSPOLI 2 (2) (2022): 140-154 Efektivitas Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting Pada Anak', *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2.2 (2022), 140–54 <http://jisip.org/index.php/jsp/article/view/67>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keluarga. Di dalam petunjuk teknis pelaksanaan P2K2 menjabarkan tujuan-tujuan dari program tersebut yaitu:[41]

1) Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, ekonomi, dan perlindungan anak;
2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga PKH mengenai kondisi, kebutuhan dan perawatan yang dibutuhkan lansia dan orang dengan disabilitas berat;
3) Membangun kesadaran peserta PKH terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam PKH;
4) Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak;
5) Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait perawatan dan pemeliharaan terhadap lansia dan orang dengan disabilitas berat;
6) Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak;
7) Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

c. Pelaksanaan[42]

Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini dilaksanakan selama sebulan sekali yang pada setiap satu kali pertemuan disampaikan satu sesi, dan dalam satu sesi dilakukan selama 120 menit. Penentuan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan antara pendamping dan KPM. Hal ini karena P2K2 dalam pelaksanaanya memiliki prinsip untuk tidak membebani pesertanya, sehingga untuk menentukan jadwal kapan dilaksanakan P2K2 perlu adanya kesepakatan bersama agar tidak memberatkan KPM.

---

[41] Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, 'Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan', 53 (2018), 1–9 <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20191029025206.pdf>.

[42] Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, "Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pendamping PKH dalam P2K2 bertugas sebagai pelaksana yang mana sebelumnya telah diberikan pembekalan berupa Diklat P2K2 maupun kegiatan coaching dari balai Diklat, Sedangkan Peserta terdiri dari seluruh KPM PKH. Selanjutnya pada proses pelaksanaannya, ditentukan untuk satu orang pendamping nantinya membuat kelompok diskusi dengan diisi tidak lebih dari 40 peserta. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal.

Dalam pelaksanaanya, pendamping memaparkan materi sebagai upaya untuk mengedukasi peserta yang dilakukan setiap pertemuannya selama 15 kali pertemuan. Selain itu, peserta juga diberikan modul berupa modul pendidikan dan kesehatan yang merupakan prioritas yang harus diberikan kepada KPM. Untuk pemilihan lokasi pertemuan, biasanya ditentukan oleh kesepakatan bersama bisa di balai desa maupun di rumah peserta. Setelah adanya penyampaian materi, pendamping juga memberikan motivasi kepada peserta terkait pentingnya pendidikan, kesehatan, serta mengelola keuangan dan pengasuhan anak yang baik.

Setelah dilaksanakan pertemuan seperti yang telah dijadwalkan, selanjutnya setiap bulannya pendamping melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan P2K2 kepada koordinator selain sebagai evaluasi juga untuk penilaian kinerja pendamping.

d. Materi

Materi yang harus disampaikan pada pertemuan ini terdiri dari beberapa modul, yakni:

1) Pengasuhan dan Pendidikan Anak[43]

Tujuan adanya modul pengasuhan dan pendidikan anak adalah untuk memperdalam pemahaman orangtua terkait pentingnya menerapkan pola asuh yang baik di rumah dan pendidikan untuk menunjang kesuksesan anak di masa mendatang.

Modul ini terdiri dari 4 topik, pertama topik tentang bagaimana menjadi orangtua yang lebih baik. Topik ini menyampaikan bahwa perilaku anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua mendidik anaknya sehingga perlu dibekali pemahaman

[43] Kemensos, *Modul Pengasuhan Dan Pendidikan Anak*, 2018.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pentingnya mendidik dengan cara yang baik karena pola mendidik orang tua memiliki konsekuensi besar pada perilaku anaknya. Selain itu juga disampaikan perlunya kerjasama antara kedua orang tua dalam mendidik anak, karena ayah dan ibu memiliki peran yang sama.

Kedua, topik tentang memahami perilaku anak usia dini. KPM diberikan pemahaman tentang bagaimana meningkatkan perilaku baik pada anak yaitu dengan memberikan apresiasi kepada anak ketika anak berperilaku baik, juga memahami apa kebelebihan dan anak. Selain itu, pada topik ini juga dipaparkan bagaimana mengurangi perilaku buruk anak, yakni dengan tidak melakukan kekerasan fisik ketika anak berbuat salah dan diganti dengan memberikan pemahaman apa konsekuensi yang masuk akal dari perbuatan yang salah.

Ketiga tentang memahami cara anak usia dini belajar. KPM diberikan pembekalan bagaimana permainan bisa menjadi stimulus dalam perkembangan bahasa anak, melalui permainan yang sesuai dengan usia anak. Selain itu, KPM juga dibekali pentingnya menggabungkan permainan anak dengan kegiatan sehari-harinya.

Keempat pembekalan terkait bagaimana membantu anak agar sukses di sekolah. Pembekalan ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya sekolah bagi anak mengingat sebelumnya tingkat pendidikan yang rendah, juga memberikan saran kepada orang tua bagaimana mengatasi bila ada permasalahan anak di sekolah.

2) Kesehatan dan Gizi[44]

Modul ini berupa berisikan panduan tentang pentingnya gizi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, menyusui, hingga balita. Selain itu juga diberikan pemahaman terkait kesehatan pada anak dan menjaga kesehatan lingkungan. Dalam penyampaian modul ini, dilakukan oleh tenaga kesehatan baik Bidan

[44] Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, 'Modul Kesehatan Dan Gizi', *Kementerian Sosial RI*, 2018, 1–117 <https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181010110059.pdf>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

maupun ahli gizi. Sehingga pendamping harus melakukan koordinasi dengan pelayanan kesehatan setempat seperti puskesmas.

3) Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha[45]

Dalam pelaksanaan modul ini diberikan pembekalan tentang pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan usaha. Perlu dipahami bahwa pengetahuan dasar yang diberikan tidak akan menyelesaikan semua masalah keuangan yang dihadapi peserta, namun membantu mereka untuk menguranginya secara bertahap.

Modul pengasuhan dan pendidikan anak terdiri dari tiga topik yang mana pada pada sesi pertama terkait mengelola keuangan keluarga yang mana bertujuan untuk membantu mengatur bagaimana pengeluaran seimbang dengan pendapatan dengan cara mengajarkan bagaimana menghitung rata-rata pendapatan dan pengeluaran bulanan sesuai tingkat kepentingan.

Selanjutnya sesi kedua tentang cermat meminjam dan menabung yang bertujuan agar peserta memiliki kemampuan meminjam uang secara terencana dan tidak mudah terjebak utang. Selain itu juga menyarankan tempat yang tepat untuk meminjam, dan juga memotivasi peserta untuk mulai menabung agar tidak berhutang kembali.

Dan pada sesi tiga tentang memulai usaha. Tujuan adanya sesi ini adalah agar peserta tertarik untuk memulai suatu usaha. Isi materi ini disampaikan dimulai dari bagaimana cara merencanakan usaha, mengidentifikasi peluang usaha terutama yang ada disekitar, juga terkait manajemen keuangannya yang berupa cara membuat rancangan belanja, memasarkan usaha, juga mengelola keuangan pada usaha.

[45] Kementerian Sosial, 'Modul PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN USAHA', *Kementerian Sosial RI*, 2018 <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181010110008.pdf>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4) Perlindungan Anak[46]

Pada modul perlindungan anak ini dibagi menjadi 2 sesi, yakni: pertama terkait upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Peserta dibekali pengetahuan terhadap cara perlindungan pada anak dengan memaparkan apa saja perlakuan yang salah, bagaimana cara mendeteksi dini pada kekerasan seksual, bagaimana mencegah kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pencegahan kekerasan pada anak berkebutuhan khusus.

Kedua tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Harapan setelah adanya materi ini adalah peserta lebih memahami dan mengetahui cara pencegahan terhadap eksploitasi terhadap anak.

5) Kesejahteraan Sosial[47]

Modul kesejahteraan mencakup dua sesi yaitu pada sesi pertama terkait penanganan pada penyandang disabilitas berat. Tujuannya agar bisa merubah pola pikir pada semua orang terkait disabilitas, bahwa disabilitas juga memiliki potensi-potensi yang bisa disalurkan, karena disabilitas bukan memiliki arti tidak bisa melakukan apa saja. Selain itu disabilitas juga memiliki hak-hak yang harus dihargai baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Sesi kedua berisi pentingnya kesejahteraan lanjut usia, dengan memberikan pemahaman kondisi serta masalah-masalah apa saja yang pada umumnya dialami lansia dan bagaimana cara penangannya. Di sesi ini juga membahas beberapa kekerasan yang dialami lansia dan banyaknya lansia yang seringkali ditelantarkan oleh keluarga terdekatnya

e. P2K2 dalam Peningkatakan SDM PKH

Sebagai program pemberdayaan dalam Program keluarga Harapan (PKH), P2K2 memiliki tujuan dalam peningkatan SDM Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terdapat penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bagaimana P2K2 mampu meningkatkan keterampilan hidup

[46] Kemensos, *Modul Perlindungan Anak*, *Kemensos*, 2018 <https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181010110312.pdf>.

[47] Kemensos, 'Modul Kesejahteraan Sosial Disabilitas Dan Lansia', *Https://Www.Kemsos.Go.Id/Content/Indikator-Kemiskinan*, 28, 2018, 4–7.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

KPM. Iis Arfiyani dll dalam penelitiannya yang berjudul *"Family Development Session (FDS) Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Hidup Masyarakat Miskin"* mengungkapkan bahwa FDS atau P2K2 mampu meningkatkan keterampilan hidup KPM. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan dalam pola pengasuhan anak yakni orang tua telah menyadari bahwa penghasilan yang rendah tidak menghalangi untuk menjadi orang tua yang baik dan bisa mengasuh anak dengan baik. Disamping itu, kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya juga meningkat, serta kesadarakan akan pentingnya kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak. Selain itu, masyrakat juga mulai menyadari akan pentingnya menabung dan membuat warung bersama.[48] Sementara Yulia annisa mengungkapkan bahwa P2K2 efektif dalam meningkatkan kemandirian KPM PKH.[49] P2K2 juga mampu meningkatkan pengetahuan, ekonomi keluarga, keterampilan KPM, serta adanya peningkatan perubahan perilaku KPM PKH.[50]

Hal di atas mengungkapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan selama P2K2 mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesejahteraan serta perubahan perilaku KPM PKH. Haidong Zhao dan Lini Zhang mengungkapkan bahwa sosialisasi keuangan berpengaruh secara langsung terhadap literasi keuangan serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku keuangan dan kesejahteraan keuangan.[51]

5. Graduasi

Graduasi merupakan masa berakhirnya kepesertaan karena kriteria kepesertaan yang tidak terpenuhi serta kondisi sosial

[48] Arfiyani, Raharjo, and Yusuf.

[49] Annisa, Kamal, and Alkhendra.

[50] Wahyu Trisnawati, 'FAMILY DEVELOPMENT SESSION (FDS) DI DESA SIDAURIP KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP', *Tesis*, 2020.

[51] Haidong Zhao and Lini Zhang, 'Talking Money at Home: The Value of Family Financial Socialization', *International Journal of Bank Marketing*, 38.7 (2020), 1617–34 <https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2020-0174>.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ekonomi yang telah meningkat sesuai hasil dari pemutakhiran data.[52]

a. Tujuan Graduasi

Tujuan graduasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan tahun 2020 adalah sebagai berikut:[53]

1) Untuk Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH;
2) Untuk Memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran;
3) Untuk Meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial; dan
4) Untuk Mewujudkan rasa keadilan sosial.

b. Jenis Graduasi

Graduasi terbagi ke dalam 2 jenis, diantaranya adalah:[54]

1) Graduasi alamiah

Merupakan masa berakhirnya kepesertaan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan KPM PKH. Contoh:

- Tidak memiliki pengurus kepesertaan
- Tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan: Kesehatan, Pendidikan atau Kesejahteraan Sosial.

2) Graduasi Sejahtera Mandiri

Merupakan masa berakhirnya kepesertaan yang disebabkan oleh meningkatnya kondisi sosial ekonomi KPM PKH serta sudah dikategorikan mampu sehingga dikategorikan sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial PKH. Kondisi ini terjadi karena inisiatif KPM untuk graduasi karena merasa telah mampu dan mandiri secara finansial. Selain itu, graduasi mandiri

---

[52] Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *PETUNJUK TEKNIS GRADUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2020*. …12

[53] Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *PETUNJUK TEKNIS GRADUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2020*. …13

[54] Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *PETUNJUK TEKNIS GRADUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2020*. …14

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

juga terjadi karena adanya dorongan dari pihak terkait. Contoh:

- KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain
- KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN), memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses, dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Besse Rachmawati, 2021, Peningkatan Perilaku Sosial Anak Usia Dini Melalui *Family Development Session (Fds)* Pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Jambi	● P2K2 di kota Jambi dilakukan satu bulan sekali. ● Alasan keikutsertaan KPM karena program ini wajib diikuti oleh seluruh KPM. ● Dampak FDS mampu meningkatkan perilaku positif pada anak usia dini serta kesadaran serta sikap tanggung jawab anak. ● Kendala yang dialami adalah kurangmya partisipasi	● **Persamaan** Penggunaan metode kualitatif, serta fokus penelitian pada pelaksanaan P2K2 ● **Perbedaan** Tujuan penelitian yang berbeda yaitu mengetahui pelaksanaan dan dampaknya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2.	Sukesi, 2020, Analisis Pengaruh Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) di Jawa Timur	Variabel *Outcome* (X1) dan Inovasi (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) KPM PKH di Jawa Timur.	• **Persamaan** Sama-sama tentang Pelaksanaan P2K2 terhadap peningkatan graduasi • **Perbedaan** Metode kuantitatif, serta tujuannya hanya mengetahui pengaruhnya pada graduasi sejahtera mandiri saja
3.	Heriana Bangun, 2019, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Medan Johor	Pelaksanaan PKH di kecamatan Johor secara umum sudah efektif. Namun pada aspek tertentu hasilnya belum efektif yaitu pendamping yang dalam pelaksanaan tugasnya kurang baik, partisipasi KPM untuk ikut pertemuan kelompok masih kurang, saldo ATM yang digunakan dalam penyaluran masih nol maupun beberapa mengalami ATM yang rusak dan hilang, juga persepsi KPM pada program	• **Persamaan** Penggunaan indikator dari Sutrisno. • **Perbedaan** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		ini masih belum tepat.	
4.	Nur Khoiriyah dan Kunarti, 2019, Graduasi Mandiri: Bentuk Pemeberdayaan Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Pati	● Pelaksanaan pemberdayaan berupa pertemuan rutin bulanan dalam bentuk pemberian materi yang berisi terkait pemberdayaan. ● Bentuk bantuan diberikan secara terus-menerus meskipun dengan angka yang kecil namun rutin diberikan. ● Proses pemberdayaan ● dilakukan hingga lulus secara mandiri	● **Persamaan** Kedua penelitian ini memiliki kesamaan ingin mengetahui pelaksanaan program yang mendorong pemberdayaan masyarakat. ● **Perbedaan** Kalau penelitian Nur mencari tahu kondisi proses pemberdayaan yang melalui FDS, hingga kondisi setelah lulus.
5.	Yulia Annisa, Tamrin Kamal, dan Alkhendra, 2020, *Family Development Session* Sebagai Program Anti-Kemiskinan di Desa Pungut Hilir? Kajian atas Efektivitas dan Kemandirian	● Frekuensi pelaksanaan FDS meningkatkan efektivitas sebelas 9,1%. Di samping itu, Efektivitas program mengalami peningkatan sebesar 70,15 terhadap kemandirian ● Namun dalam rangka mengurangi kemingkinan,	● **Persamaan** kesamaan pembahasan terkait efektivitas FDS dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ● **Perbedaan** Penggunaan metode kuantitatif

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		program ini belum berjalan maksimal	
6.	Murah, Ari Saputra, Risky Ayu Arnila 2020, Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Responsivitas Program Family Development Session Program Keluarga Harapan (FDS-PKH) di Kabupaten Lombok Timur	• Efisiensi FDS PKH termasuk kategori sangat baik dengan prosentase sejumlah 84,50%, • Efektivitas dikategorikan sangat baik dengan prosentase sejumlah 86,14%, • Responsivitas pada kategori sangat baik dengan 84,25%	• **Persamaan** sama-sama membahas terkait Efektivitas FDS • **Perbedaan** Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif

C. KERANGKA BERPIKIR

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan salah satu program pemberdayaan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini berupa proses pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur yang memiliki tujuan adanya perubahan perilaku pada KPM PKH. Sebagaimana tujuan akhir dari pemberdayaan secara umum yaitu adanya dampak yang timbul berupa perubahan perilaku. Hal ini juga sejalan dengan pemberdayaan dalam perspektif Islam yakni proses pemberdayaan itu tidak hanya dalam sisi material namun juga menambah wawasan peserta, serta mampu lebih berdaya dalam hal meningkatkan dimensi spiritual (Iman), menambah dimensi pengetahuan (*'ilm*), juga pada dimensi social (*amal*). Karena jika dengan terpenuhinya iman, ilmu dan amal mampu meningkatkan perubahan mindset masyarakat muslim sehingga lebih lanjut bisa tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*).

Dalam pelaksanaan P2K2 telah diatur sebelumnya dalam pedoman P2K2 sehingga dalam proses pertemuan yang dilakukan oleh pendamping bersama KPM harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu peneliti menggunakan metode

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

deskriptif kualitatif sebagai cara untuk mendeskripsikan implementasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Dari realita pelaksanaan yang terjadi selanjutnya, peneliti menilai apakah program ini telah dilaksanakan secara efektif dengan menggunakan indikator efektivitas dari Sutrisno yang terbagi dalam lima indikator pengukuran efektivitas pelaksanaan P2K2. Indikator-indikator tersebut berupa *pertama* pemahaman terkait program. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman program, maka dilakukan wawancara kepada pendamping PKH. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan langsung. informan dipilih melalui metode *Purposive sampling* dengan kriteria *judgment*. Adapun pengambilan sampel dilakukan melalui pertimbangan tertentu dari peneliti. Tujuan wawancara kepada pendamping yaitu agar dapat diketahui apakah pendamping telah memahami terkait P2K2, selain itu juga pada objek pemberdayaan yakni KPM PKH agar dapat mengetahui apakah setelah dilaksanakan P2K2 telah menambah pemahaman peserta.

Kedua tepat sasaran, adalah mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan program pemberdayaan sesuai kriteria kelayakan dari program tersebut. *Ketiga* tepat waktu, pelaksanaan P2K2 telah diatur terkait waktu pertemuan, sehingga dalam penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat mengetahui apakah dalam pelaksanaan P2K2 telah sesuai waktu yang ditentukan. *Keempat* Tercapainya tujuan, pada dasarnya P2K2 bertujuan dalam upaya peningkatan pengetahuan KPM PKH dalam mengasuh dan mendidik anak, kesehatan, mengelola keuangan, juga pengetahuan terkait kesejahteraan sosial di keluarga, sehingga peneliti dapat mengetahui apakah dalam pelaksanaan P2K2 mampu meningkatkan pengetahuan KPM. *Kelima,* Perubahan nyata yang berupa perubahan perilaku KPM PKH. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut tidak hanya melalui wawancara namun juga observasi secara langsung untuk mengetahui perubahan perilakunya.

Setelah dilakukan pengukuran efektivitas diharapkan mampu mengevaluasi apakah dalam pelaksanaannya telah berjalan secara efektif. Selain itu, juga dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi selama proses P2K2. Selanjutnya, ketika diketahui apakah pelaksanaanya telah efektif, peneliti melakukan identifikasi melalui dokumen graduasi kabupaten Tuban untuk membandingkan dengan realita apakah data graduasi tinggi menandakan pelaksanaan P2K2 di daerah tersebut telah berjalan secara efektif.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kerangka pemikiran tersebut, dirangkung ke dalam suatu bagan agar mempermudah memahaminya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

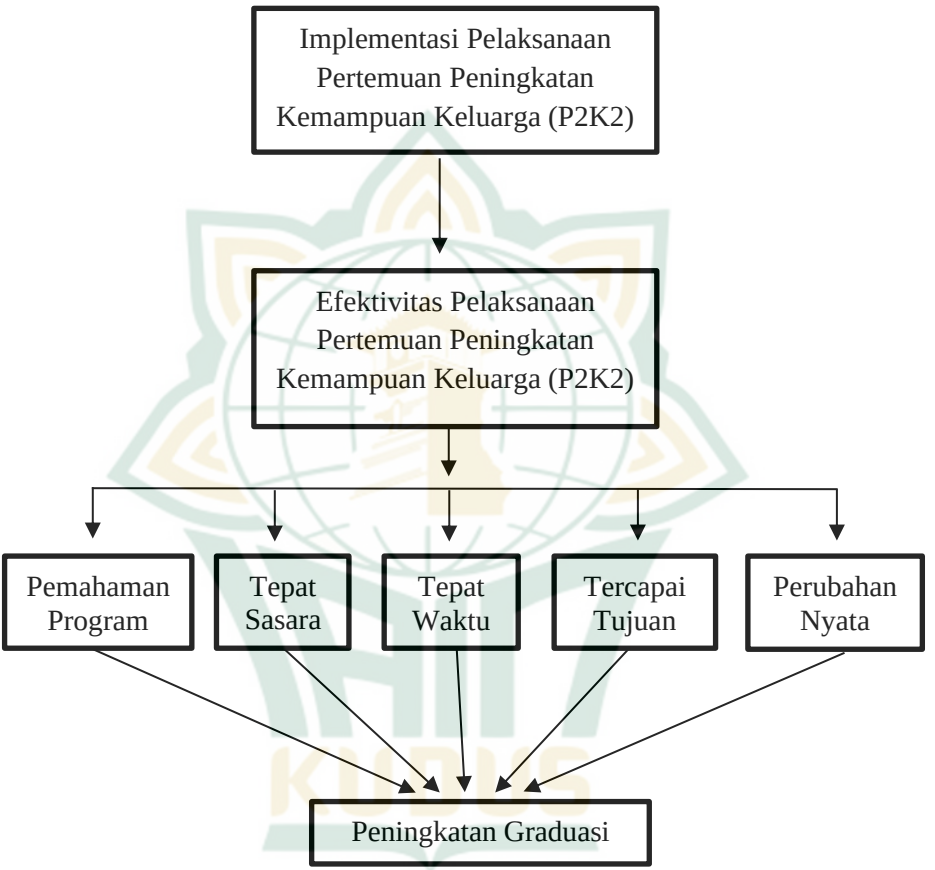

REPOSITORI IAIN KUDUS